
NOTA DINAS
Nomor: 144/IJ-IND.3/PR/X/2020

Yth : Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur II
Hal : Laporan PP 39 Inspektorat II Triwulan III Tahun 2020
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Tanggal : 8 Oktober 2020

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Rencana dan Capaian Kegiatan (Laporan PP 39) Inspektorat II Inspektorat Jenderal Triwulan III (Juli-September) Tahun 2020.

Demikian disampaikan, atas arahan Bapak lebih lanjut diucapkan terima kasih.



Inspektur II
Wawas Swathatafrijiah

Tembusan:

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan
2. Kabag. Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT II

**LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
INSPEKTORAT II**

TRIWULAN III

TAHUN 2020

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, 8 OKTOBER 2020**

KATA PENGANTAR

Laporan Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011.

Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan informasi atas capaian kinerja Inspektorat II selama Triwulan III Tahun 2020, sebagai dasar pengendalian dan perbaikan pelaksanaan kegiatan.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di Lingkungan Inspektorat II yang telah saling mendukung dan bekerja keras sehingga tugas dan fungsi Inspektorat II dapat terlaksana dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Inspektorat II, dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal.

Jakarta, 8 Oktober 2020

INSPEKTUR II



WAWAS SWATHATAFRIJAH

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. TUGAS DAN FUNGSI | 1 |
| B. LATAR BELAKANG PROGRAM/KEGIATAN | 2 |
| C. STRUKTUR ORGANISASI | 3 |
| BAB II RENCANA PROGRAM/KEGIATAN..... | 5 |
| A. PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019 | 5 |
| B. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | 7 |
| BAB III PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN | 8 |
| A. HASIL YANG TELAH DICAPAI | 8 |
| B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN | 10 |
| C. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN | 14 |
| D. LANGKAH DAN TINDAK LANJUT | 14 |
| BAB IV PENUTUP | 15 |
| LAMPIRAN | 16 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS DAN FUNGSI

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai unit kerja pengawasan internal memiliki peran mendorong pencapaian tujuan dan efektifitas pelaksanaan tugas- tugas organisasi serta mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja dilingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka dan Unit Vertikal Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia Sidoarjo.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat II mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
2. Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat.

B. LATAR BELAKANG PROGRAM/KEGIATAN

Agar fungsi - fungsi pengawasan tersebut dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program/kegiatan tahun 2020 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan di tempuh.

Arah kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2020 adalah :

- a. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, dimana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja).
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
- c. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja auditi;
- b. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
- c. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
- d. Meningkatkan profesional aparat pengawasan;
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
- f. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal;
- g. Menerapkan audit berbasis resiko.

Program Inspektorat Jenderal adalah "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perindustrian". Kegiatan Inspektorat II adalah "Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program

Pengembangan Industri Inspektorat II”, dengan output pada Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

Tabel 1. Output Pengawasan Inspektorat II tahun 2020

| NO | OUTPUT | SATUAN | KET |
|-----------|--|---------------|------------|
| 001 | Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat II | 7 Laporan | |
| 002 | Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat II | 7 Laporan | |
| 003 | Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat II | 2 Laporan | |
| 004 | Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat II | 1 Laporan | |
| 965 | Layanan Audit Internal | 1 Layanan | |

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustria, Organisasi Inspektorat II dipimpin oleh Inspektur II yang merupakan Pejabat Eselon II.

Inspektorat II membawahi:

1. Subbagian Program dan Tata Usaha

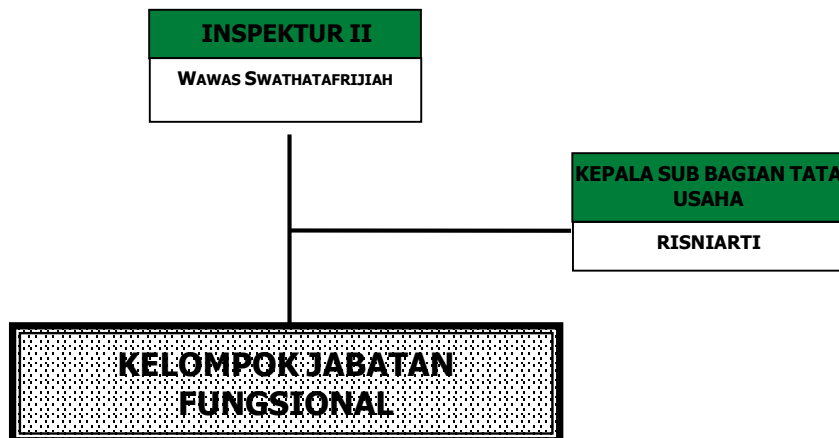
Subbagian Program dan Tata Usaha dipimpin oleh seorang pejabat eselon IV. Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat. Subbagian Program dan Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur II dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor

terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor yang ditunjuk oleh Inspektur.

Pada tahun 2020 ini, Inspektorat II memiliki total pegawai sebanyak 16 orang dengan rincian 1 (satu) orang Inspektur, 1 (satu) orang Kepala Subbagian Program dan Tata Usaha, dan 14 (empat belas) orang Auditor.



BAB II

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A. PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020

Inspektorat II pada tahun 2020 mempunyai Kegiatan “Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II” dengan anggaran sebesar **Rp. 3.438.717.000,-** Pagu ini mengalami Penghematan sebesar **Rp. 2.227.816.000,-** yang dialokasikan untuk penanganan Covid 19 , Pagu Inspektorat II pada Triwulan III tahun 2020 menjadi sebesar **Rp. 1.210.901.000,-** yang terdiri dari Layanan Audit Inspektorat II, Layanan Reviu Inspektorat II, Layanan Monitoring Dan Evaluasi Cakupan Tugas Inspektorat II, layanan Consulting, Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat II, dan Laporan Penganggaran Dan Akuntabilitas Inspektorat II. Alokasi anggaran kegiatan tersebut terdiri dari :

Tabel 2. Alokasi Anggaran dan Aktivitas Inspektorat II Tahun Anggaran 2020

| kode | Uraian | vol | Pagu Awal | Pagu Revisi |
|-------------|--|--------------|------------------|--------------------|
| 1842 | Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II | | 3.438.717.000 | 1.210.901.000 |
| 1842.001 | Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat II | 7 Laporan | 590.249.000 | 186.737.000 |
| 051 | Penyusunan Program Kerja dan Anggaran | | 26.692.000 | 10.692.000 |
| 052 | Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas | | 28.865.000 | 15.865.000 |
| 053 | Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya | | 534.692.000 | 160.180.000 |
| 1842.002 | Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat II | 7 Laporan | 133.232.000 | 78.768.000 |
| 051 | Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II | | 133.232.000 | 78.768.000 |
| A | Koordinasi Reviu Laporan Keuangan dan BMN | | 65.866.000 | 38.634.000 |
| B | Reviu Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II | | 67.366.000 | 40.134.000 |
| 1842.003 | Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat II [Base Line] | 2 Laporan | 1.316.005.000 | 268.809.000 |
| 051 | Monitoring dan Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Cakupan Inspektorat II | | 26.096.000 | 5.846.000 |
| 052 | Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Pemerintahan Sesuai Kebijakan Pengawasan | | 1.289.909.000 | 262.963.000 |
| AA | Persiapan pelaksanaan Monev Program Penumbuhan Wirausaha Baru (WUB) | | 128.365.000 | 20.540.000 |

| | | | | |
|----------|--|--------------|-------------|-------------|
| AB | Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring ke Dinas Provinsi Penerima Dana Dekonsentrasi | | 856.643.000 | 242.423.000 |
| BA | Persiapan Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring Pemanfaatan Techno Park Ditjen ILMATE | | 122.365.000 | - |
| BB | Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring ke Techno Park | | 182.536.000 | - |
| 1842.004 | Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat II | 1 Laporan | 704.718.000 | 293.129.000 |
| 051 | Konsultasi Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja | | 376.594.000 | - |
| A | Koordinasi Pembinaan dan Pendampingan Penyusunan Peta Risiko dan Kertas Kerja SPIP di Ditjen ILMATE dan IKMA | | 96.146.000 | - |
| B | Pelaksanaan FGD Penyusunan Peta Risiko dan Kertas Kerja SPIP | | 280.448.000 | - |
| 052 | Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi | | 328.124.000 | 293.129.000 |
| A | Koordinasi Pemetaan BMN yang Belum Dihilangkan di Ditjen ILMATE dan IKMA | | 44.665.000 | 68.892.000 |
| B | Pelaksanaan Pemetaan BMN dan Penyelesaian Hibah BMN di Ditjen ILMATE dan IKMA | | 152.552.000 | - |
| C | Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring Penyelesaian Hibah BMN di Ditjen ILMATE dan IKMA | | 63.688.000 | 212.018.000 |
| D | Pengawasan Triwulanan Kegiatan Prioritas Ditjen ILMATE dan IKMA | | 67.219.000 | 12.219.000 |
| 1842.965 | Layanan Audit Internal | 1 Layanan | 694.513.000 | 383.458.000 |
| 052 | Pelaksanaan audit internal | | 363.439.000 | 241.947.000 |
| A | Audit Kinerja pada Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika | | 101.456.000 | 82.002.000 |
| B | Audit Program Pengembangan dan Penumbuhan Industri Kecil, Menengah dan Aneka dan BPIPI Sidoarjo | | 162.873.000 | 100.629.000 |
| C | Audit Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) Ditjen ILMATE dan IKMA | | 99.110.000 | 59.316.000 |
| 053 | Pelaksanaan audit khusus | | 66.431.000 | - |
| A | Penyusunan dan Pelaksanaan Audit Khusus Cakupan Tugas Inspektorat II | | 66.431.000 | - |
| 054 | Tindak Lanjut Hasil Laporan Pemeriksaan LHP | | 217.797.000 | 132.165.000 |
| A | Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Ditjen ILMATE dan IKMA | | 51.865.000 | 11.865.000 |
| B | FGD Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Ditjen ILMATE dan IKMA | | 165.932.000 | 120.300.000 |
| 055 | Reviu Perencanaan Anggaran | | 46.846.000 | 9.346.000 |

B. SASARAN PROGRAM/KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

Sasaran dan Indikator Kinerja yang dilaksanakan Inspektorat II pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja TA 2020

| NO. | SASARAN PROGRAM | Kode | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|--|---|------|--|--------|
| PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN | | | | |
| 1 | Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian | S1 | Batas Toleransi Temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *IKU | 2,8% |
| | | S2 | Jumlah Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II *IKU | 5% |
| | | S3 | Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti | 80% |
| | | S4 | Rekomendasi Hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat UU | 91% |
| 2 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | S5 | Nilai Maturitas SPIP Satker cakupan tugas Inspektorat II *IKU | 3,6 |
| PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL | | | | |
| 3 | Terselenggaranya pengawasan Internal Yang Efektif | T1 | Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan | 75% |
| | | T2 | Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) | 76% |
| PERSPEKTIF KELEMBAGAAN | | | | |
| 4 | Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien | L1 | Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT | 70% |
| | | L2 | Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya | 80% |

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

A. HASIL YANG TELAH DICAPAI

Realisasi keuangan kegiatan Manajemen Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pengawasan, Reviu Laporan Keuangan dan BMN, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri, Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi dan Layanan Audit Internal pada Triwulan III tahun 2020 (Juli-September) sesuai aplikasi PP39 mencapai Rp. 50.784.339,- atau sebesar 4,19% dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.210.901.000,- dengan realisasi capaian Fisik sebesar 33,68%.

Adapun realisasi keuangan sampai dengan Triwulan III tahun anggaran 2020 (Januari-September) sesuai aplikasi PP39 mencapai Rp. 449.098.350,- Atau sebesar 37.09% dari total anggaran Rp. 1.210.901.000,- dengan realisasi capaian fisik sebesar 64,71% dan sesuai Aplikasi SAS realisasi keuangan sebesar Rp. 622.520.900,- atau 51,40%. Perbedaan realisasi anggaran disebabkan dalam aplikasi PP39 masih terdapat SPTJB belum keluar Nomor dan Tanggal SP2D-nya sehingga nilai realisasi keuangan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan realisasi Aplikasi SAS.

Tabel 4. Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan Inspektorat II Triwulan III Tahun 2020

Realisasi Sesuai aplikasi PP39

| Jenis Kegiatan | PAGU Anggaran | Triwulan Ini | | | s/d Triwulan Ini | | | Sisa Anggaran s/d Triwulan III | |
|--|---------------|--------------|------------|-------|------------------|-------------|-------|--------------------------------|-------|
| | | Fisik (%) | Keuangan | % | Fisik (%) | Keuangan | % | J u m l a h | % |
| Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat II | 186.737.000 | 46,02 | 10.079.009 | 5,40 | 84,58 | 100.122.740 | 53,62 | 86.614.260 | 46,38 |
| Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat II | 78.768.000 | 24,52 | 0 | - | 100,00 | 67.725.120 | 85,98 | 11.042.880 | 14,02 |
| Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat II | 268.809.000 | 81,24 | 2.393.002 | 0,89 | 82,65 | 3.379.999 | 1,26 | 265.429.001 | 98,74 |
| Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat II | 293.129.000 | 23,15 | 34.862.332 | 11,89 | 48,46 | 108.086.649 | 36,87 | 185.042.351 | 63,13 |
| Layanan Audit Internal | 383.458.000 | 4,28 | 3.449.996 | 0,90 | 47,63 | 169.783.841 | 44,28 | 213.674.159 | 55,72 |
| | 1.210.901.000 | 33,68 | 50.784.339 | 4,19 | 64,71 | 449.098.350 | 37,09 | 761.802.650 | 62,91 |

Realisasi Sesuai Aplikasi SAS

| Jenis Kegiatan | PAGU Anggaran | s/d Triwulan Ini | | | Sisa Anggaran s/d Triwulan III | |
|--|---------------|------------------|-------------|-------|--------------------------------|-------|
| | | Fisik (%) | Keuangan | % | J u m l a h | % |
| Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat II | 186.737.000 | 86,27 | 109.515.600 | 58,64 | 77.221.300 | 41,36 |
| Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat II | 78.768.000 | 100 | 67.725.100 | 85,98 | 11.042.900 | 14,02 |
| Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat II | 268.809.000 | 82,65 | 105.365.600 | 39,20 | 163.443.400 | 60,8 |
| Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat II | 293.129.000 | 57,86 | 168.161.600 | 57,37 | 124.967.300 | 42,63 |
| Layanan Audit Internal | 383.458.000 | 47,63 | 171.752.900 | 44,79 | 211.705.100 | 55,21 |
| | 1.210.901.000 | 67,25 | 622.520.900 | 51,40 | 588.380.000 | 48,60 |

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Inspektorat II yang diturunkan dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal maka Inspektorat II menetapkan Indikator Kinerja dan merupakan indikator kinerja utama (IKU) untuk setiap sasaraannya di perspektif pemangku kepentingan dan perspektif proses bisnis internal, analisis capaian kinerja dilakukan berdasarkan perjanjian kinerja TA 2020 yang telah ditetapkan yaitu :

Tabel 5. Realisasi Perkembangan Perjanjian Kinerja TA 2020

| NO. | SASARAN PROGRAM | Kode | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISA SI | KET |
|--|---|------|--|--------|------------|--|
| PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN | | | | | | |
| 1 | Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian | S1 | Batas Toleransi Temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *IKU | 2,8% | 0,15% | Tercapai Target |
| | | S2 | Jumlah Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II *IKU | 5% | | Belum dapat diukur |
| | | S3 | Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti | 80% | 100% | Realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan III adalah 100% |
| | | S4 | Rekomendasi Hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II *IKU | 91% | | Realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan III adalah 0 persen |
| 2 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | S5 | Nilai Maturitas SPIP Satker cakupan tugas Inspektorat II *IKU | 72% | | Belum dapat diukur |

| PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----|---|-----|---------|--|
| 3 | Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif | T1 | Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan | 75% | | Belum dapat diukur |
| | | T2 | Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) | 76% | 66.67 % | 2 dari 3 kegiatan audit yang sudah dilaksanakan Inspektorat II |
| PERSPEKTIF KELEMBAGAAN | | | | | | |
| 4 | Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien | L1 | Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT | 70% | 69% | 16 dari 23 Jenis kegiatan Inspektorat II dalam PKPT |
| | | L2 | Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya | 80% | 100% | Dari 7 kegiatan pengawasan yg telah dilakukan semua sesuai dengan perannya |

Sasaran Program Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian dengan indikator kinerja:

1. Batas Toleransi Temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II target 2,8%, realisasi capaian kinerjanya pada triwulan III senilai 0,115% dengan realisasi anggaran Kementerian Perindustrian sebesar Rp, 3.368.036.653.338,00 dan Nilai temuan pemeriksaan BPK sebesar Rp. 4.967.582.710,63.
2. Jumlah Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II target 5%, realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan III dapat diukur berdasarkan kegiatan pengawasan internal yang sudah selesai yaitu hasil audit pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) yang berjumlah 10 temuan dan 12 Rekomendasi dan Hasil Audit pada Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika yang berjumlah 12 temuan dan 22

Rekomendasi Namun belum dapat diukur dikarenakan belum dapat diketahui berapa jumlah temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti (cacat temuan).

3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti dengan target 80%, pada Triwulan III terdapat konsultasi dan/atau pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat II yang telah selesai ditindaklanjuti realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan III adalah 100%.
4. Rekomendasi Hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II dengan target 91%, realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan III dapat diukur berdasarkan kegiatan pengawasan internal yang sudah selesai yaitu hasil audit pada Ditjen IKMA yang berjumlah 10 temuan dengan jumlah rekomendasi perbaikan sebanyak 12 rekomendasi dan Hasil Audit pada Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika yang berjumlah 12 temuan dan 22 Rekomendasi. Namun sampai laporan PP39 TW III ini dibuat belum ada rekomendasi yang ditindaklanjuti. Sehingga realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan III adalah 0 persen (0 dari 34 rekomendasi).

Sasaran Program Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan indikator kinerja Nilai Maturitas SPIP Satker cakupan tugas Inspektorat II dengan target 72%, realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan III belum dapat diukur dikarenakan penilaian maturitas SPIP baru dilaksanakan pada Triwulan IV;

Sasaran Program Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif dengan indikator kinerja:

1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan target 75%, realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan III belum dapat diukur dikarenakan kegiatan pemantauan dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan pengawasan di Inspektorat II dengan standar pelaksanaan pengawasan belum dilaksanakan pada Triwulan III oleh Bagian Program dan Evalap Inspektorat Jenderal.
2. Persentase Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) dengan target 76%, realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan III dapat diukur berdasarkan

kegiatan pengawasan internal yang sudah selesai dilakukan dengan menggunakan bantuan lima aplikasi berbasis komputer yaitu aplikasi SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara, dan RKA-K/L. Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang telah selesai dan memenuhi kriteria tersebut adalah Audit pada Ditjen IKMA dan Audit pada Ditjen ILMATE. Sehingga capaian realisasi kerjanya pada Triwulan III adalah 66.67% (2 dari 3 kegiatan audit yang sudah dilaksanakan Inspektorat II)

Sasaran Program Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien dengan indikator kinerja:

1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT adalah 70%, realisasi capaian kerjanya pada Triwulan III dapat diukur berdasarkan kegiatan pengawasan internal yang sudah selesai dengan PKPT yang telah disusun. Pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang sesuai dengan PKPT (kesesuaian Surat Tugas dengan +/- 14 hari dari jadwal yang tertera di PKPT), PKPT Inspektorat II pada Triwulan III terjadi perubahan pola kerja dari work from office (WFO) ke work from home (WFH) sehingga Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dilakukan Revisi I dan II dampak dari pandemic Virus Corona. Kegiatan pada Triwulan III adalah Reviu LK/BMN BPIPI Semester I, Reviu LK/BMN IKMA Semester I, Penyelesaian HIBAH BMN, Reviu LK/BMN ILMATE Semester I, Reviu Pagu anggaran Ditjen IKMA TA 2021, Evaluasi Program WUB Dana Dekonsentrasi, Cek Fisik atas BMN Ditjen ILMATE, Capaian Realisasi Kinerja triwulan III (Juli-September) adalah 30 % (7 dari 23 kegiatan pengawasan Inspektorat II) sedangkan capaian realisasi sampai dengan Triwulan III (Januari-September) adalah 69% (16 dari 23 Jenis kegiatan Inspektorat II dalam PKPT).
2. Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya dengan target 80%, realisasi capaian kerjanya pada Triwulan III dapat diukur berdasarkan kesesuaian penugasan dan surat tugas dengan peran pengawasan auditor sesuai sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Inspektorat II ada 7 Kegiatan yaitu : Reviu LK/BMN BPIPI Semester I, Reviu LK/BMN IKMA Semester I, Penyelesaian HIBAH BMN, Reviu LK/BMN ILMATE Semester I, Reviu Pagu anggaran Ditjen IKMA TA 2021,

Evaluasi Program WUB Dana Dekonsentrasi, Cek Fisik atas BMN Ditjen ILMATE Sehingga capaian realisasi kinerjanya pada Triwulan III (Januari -September) adalah 100% (Pemeranan penugasan auditor sesuai dengan sertifikasi dan jabatannya maupun tugas lumpah ke atas ataupun kebawah 1 tingkat dari jabatan, maka dianggap sesuai).

C. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN

1. Terdapat ketidaksesuaian realisasi anggaran antara aplikasi PP39 dan Aplikasi SAS yang disebabkan realisasi anggaran dalam aplikasi PP39 masih terdapat SPTJB yang belum keluar Nomor dan Tanggal SP2D-nya.
2. Pelaksanaan kegiatan Inspektorat II pada Triwulan III tahun 2020 mengalami kendala yang cukup berarti dimana adanya pandemi COVID 19 yang mengakibatkan penghematan anggaran Inspektorat II sejumlah Rp.2.227.816.000,- sehingga Pagu Inspektorat II pada Triwulan III tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 1.210.901.000,- selain itu juga terjadi perubahan pola kerja dari work from office (WFO) ke work from home (WFH) sehingga Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) perlu di revisi, untuk realisasi kegiatan pengawasan kurang optimal mengingat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi kegiatan perjalanan dinas keluar kota.

D. LANGKAH TINDAK LANJUT

1. Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan untuk segera mengatasi hambatan penginputan SPTJB pada tahun Anggaran 2020.
2. Berkoordinasi dengan Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan untuk segera mengatasi hambatan dan kendala pelaksanaan kegiatan pada tahun Anggaran 2020.

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat II pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian selama periode triwulan III Tahun 2020 telah berjalan dengan baik dan berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan. Realisasi anggaran pada Triwulan III tahun 2020 (Juli-September) sesuai aplikasi PP39 mencapai Rp. 50.784.339,- atau sebesar 4,19% dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.210.901.000,- dengan realisasi capaian Fisik sebesar 33,68%.

Adapun realisasi keuangan sampai dengan Triwulan III tahun anggaran 2020 (Januari-September) sesuai aplikasi PP39 mencapai Rp. 449.098.350,- Atau sebesar 37,09% dari total anggaran Rp. 1.210.901.000,- dengan realisasi capaian fisik sebesar 64,71% dan sesuai Aplikasi SAS realisasi keuangan sebesar Rp. 622.520.900,- atau 51,40%Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat II periode Triwulan III Tahun 2020, untuk dapat dimanfaatkan sebagai mana mestinya.

LAMPIRAN

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2020
INSPEKTORAT II**

I. DATA UMUM

1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi : (247885) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi : 04. Ekonomi
 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi : 04.07. Industri Dan Konstruksi
 4. Nomor Kode dan Nama Program : 04.07.03. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian
 5. Indikator Hasil :
 6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan : **1842 - Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II**
 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/1
 8. Penanggung Jawab Kegiatan : Drs Wawas Swathatafrijiah, M.Sc., QIA
 9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 5
 10. Nomor Surat Pengesahan DIPA : SP DIPA- 019.06.1.247885/2020

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

| Nomor Kode dan Nama Output | Anggaran (Rp. 000) | | | | Indikator Keluaran (Output) | Satuan (Unit) |
|--|--------------------|------|------------------|------------------|-----------------------------|---------------|
| | No. Loan | PHLN | Rupiah | Total | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 001 Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja | | - | 186.737 | 186.737 | | 7 Laporan |
| 002 Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan | | - | 78.768 | 78.768 | | 7 Laporan |
| 003 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas | | - | 268.809 | 268.809 | | 2 Laporan |
| 004 Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas | | - | 293.129 | 293.129 | | 1 Laporan |
| 965 Layanan Audit Internal | | - | 383.458 | 383.458 | | 1 Layanan |
| Total | | - | 1.210.901 | 1.210.901 | | |

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

| Output | S.D. Triwulan Lalu (%) | | | | Triwulan Ini (%) | | | | S.D. Triwulan Ini (%) | | | | Lokasi Kegiatan |
|---|------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| | Keuangan | | Fisik | | Keuangan | | Fisik | | Keuangan | | Fisik | | |
| | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | S | R | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 001 Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja | 58,36 | 48,22 | 50,85 | 38,56 | 20,20 | 5,40 | 24,58 | 46,02 | 78,55 | 53,62 | 75,42 | 84,58 | DKI JAKARTA |
| 002 Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan | 93,35 | 85,98 | 76,37 | 75,48 | 6,65 | - | 23,63 | 24,52 | 100,00 | 85,98 | 100,00 | 100,00 | DKI JAKARTA |
| 003 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas | - | 0,37 | 1,45 | 1,41 | 66,77 | 0,89 | 64,67 | 81,24 | 66,77 | 1,26 | 66,12 | 82,65 | DKI JAKARTA |
| 004 Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat | 25,24 | 24,98 | 25,99 | 25,32 | 61,61 | 11,89 | 25,57 | 23,15 | 86,86 | 36,87 | 51,55 | 48,46 | DKI JAKARTA |
| 965 Layanan Audit Internal | 44,88 | 43,38 | 47,63 | 43,35 | 15,91 | 0,90 | 13,77 | 4,28 | 60,79 | 44,28 | 61,39 | 47,63 | DKI JAKARTA |
| Jumlah | 35,39 | 32,89 | 34,50 | 31,03 | 38,32 | 4,19 | 30,23 | 33,68 | 73,72 | 37,09 | 64,74 | 64,71 | |

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

| No | Output | Kendala | Tindak Lanjut yang Diperlukan | Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah |
|----|--------|-------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | TIDAK ADA KENDALA | | |

Jakarta Selatan, 8 Oktober 2020

Inspektur II Inspektorat Jenderal



Drs Wawas Swathatafrijah, M.Sc., QIA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT II**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wawas Swathatafrijiah
Jabatan: Inspektur II

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Arus Gunawan
Jabatan: Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Maret 2020

Inspektur Jenderal



Arus Gunawan

Inspektur II



Wawas Swathatafrijiah

REALISASI PELAKSANAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 TRIWULAN III

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Kegiatan yang dilaksanakan | Anggaran | Target Total | Triwulan III | | | | Penanggung Jawab | Pelaksana |
|--|---|--|--|---------------|--------------|--|----|--|--------|------------------|--------------------------------|
| | | | | | | Rencana | % | Realisasi | % | | |
| 1 | Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian | 1. Batas Toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II | - Audit Kinerja Ditjen ILMATE - Audit Pengembangan dan Penumbuhan IKMA dan BPIP - Audit BMDTP Ditjen ILMATE dan Ditjen IKMA - Pelaksanaan Evaluasi dan monitoring ke Dinas Provinsi Penerima Dana Dekonsentrasi - Persiapan Pelaksanaan Monev WUB Ditjen IKMA - Pengawasan Triwulanan Kegiatan Prioritas Dirjen ILMATE dan Ditjen IKMA - Reviu PIPK - Reviu RKAKL - Monev SAKIP Satker Cakupan Inspektorat II - Persiapan Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring Pemanfaatan Techno Park Ditjen ILMATE - Koordinasi Pemetaan BMN yang Belum Dihilangkan di Ditjen ILMATE dan IKMA | 2.022.581.000 | 2,8% | - Persiapan Pelaksanaan Monev WUB Ditjen IKMA - Reviu RKAKL - Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring Penyelesaian Hibah BMN di Ditjen ILMATE dan IKMA - Pelaksanaan Pemetaan BMN dan Penyelesaian Hibah BMN di Ditjen ILMATE dan IKMA - Reviu PIPK - Reviu LK dan BMN Satker Inspektorat II - Pengawasan Triwulanan Kegiatan Prioritas Dirjen ILMATE dan Ditjen IKMA - Reviu RKAKL | 25 | - Persiapan Pelaksanaan Monev WUB Ditjen IKMA - Reviu RKAKL - Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring Penyelesaian Hibah BMN di Ditjen ILMATE dan IKMA - Pelaksanaan Pemetaan BMN dan Penyelesaian Hibah BMN di Ditjen ILMATE dan IKMA - Reviu LK dan BMN Satker Inspektorat II - Pengawasan Triwulanan Kegiatan Prioritas Dirjen ILMATE dan Ditjen IKMA - Reviu RKAKL | 0,15% | Inspektur II | Seluruh Pegawai Inspektorat II |
| | | 2. Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II | | 0 | 5% | | 0 | | 0% | Inspektur II | Seluruh Pegawai Inspektorat II |
| | | 3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti | - Pelaksanaan audit Khusus - Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya | 601.123.000 | 80% | - Pelaksanaan audit Khusus - Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya | 25 | - Pelaksanaan audit Khusus - Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya | 100% | Inspektur II | Seluruh Pegawai Inspektorat II |
| | | 4. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II *) IKU | Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Ditjen ILMATE dan IKMA | 382.862.000 | 91% | Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Ditjen ILMATE dan IKMA | 0 | Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Ditjen ILMATE dan IKMA | 0% | Inspektur II | Seluruh Pegawai Inspektorat II |
| 2 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | 1. Nilai Maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat II *) IKU | - Pelaksanaan FGD Penyusunan Peta Risiko dan Kertas Kerja SPIP - Konsultasi Penyusunan Peta Risiko | 376.594.000 | 3,6 | Konsultasi Penyusunan Peta Risiko | 0 | Konsultasi Penyusunan Peta Risiko | 0% | Inspektur II | Seluruh Pegawai Inspektorat II |
| PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL | | | | | | | | | | | |
| 3 | Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif | 1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan | | 0 | 75% | | 75 | | 0% | Inspektur II | Seluruh Pegawai Inspektorat II |
| | | 2. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) | | 0 | 76% | | 0 | | 66,67% | Inspektur II | Seluruh Pegawai Inspektorat II |
| PERSPEKTIF KELEMBAGAAN | | | | | | | | | | | |
| 4 | Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien | Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT | - Penyusunan Program Kerja dan Anggaran - Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas | 55.557.000 | 70% | - Penyusunan Program Kerja dan Anggaran - Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas | 20 | - Penyusunan Program Kerja dan Anggaran - Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas | 100% | Inspektur II | Seluruh Pegawai Inspektorat II |
| | | Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya | | 0 | 80% | | 0 | | 69% | Inspektur II | Seluruh Pegawai Inspektorat II |

Jakarta, 8 Oktober 2020
INSPEKTUR II



Drs Wawas Swathatafrizah, M.Sc., CIA



Kegiatan Inspektorat II

Monitoring Capaian

Sasaran & Indikator

| No. | Indikator | Target | TW I | | TW II | | TW III | | TW IV | | Real. Fisik | Real. Keu | Capaian |
|---|---|--------|------|-----|-------|-----|--------|-----|-------|----|-------------|-----------|---------|
| | | | T | R | T | R | T | R | T | R | | | |
| 1. IJ.C1 - Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian | | | | | | | | | | | | | |
| | IJ.C1.1 - Batas Toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II | 2,8 % | 19% | 25% | 36% | 34% | 67% | 70% | 100% | 0% | 73% | 58% | 100 % |
| | Pagu = Rp. 891.999.000 | | | | | | | | | | | | |
| | IJ.C1.4 - Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II | 5 % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 % |
| | Pagu = Rp. 0 | | | | | | | | | | | | |
| | IJ. C1.3 - Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti | 80 % | 25% | 35% | 50% | 35% | 75% | 85% | 100% | 0% | 85% | 60% | 100 % |
| | Pagu = Rp. 160.180.000 | | | | | | | | | | | | |
| | IJ.C1.2 - Rekomendasi hasil pengawasan internal ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II | 91 % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0 % |
| | Pagu = Rp. 11.865.000 | | | | | | | | | | | | |
| | Total Pagu Sasaran = Rp. 1.064.044.000 | | | | | | | | | | | | |
| 2. IJ.C2 - Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik | | | | | | | | | | | | | |
| | IJ.C2.1 - Nilai maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat II | 3,6 % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 % |
| | Pagu = Rp. 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Total Pagu Sasaran = Rp. 0 | | | | | | | | | | | | |
| 3. IJ.C3 - Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif | | | | | | | | | | | | | |
| | IJ.C3.2 - Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) | 76 % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 66,7 % |
| | Pagu = Rp. 0 | | | | | | | | | | | | |
| | IJ.C3.1 - Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan | 75 % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 % |
| | Pagu = Rp. 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Total Pagu Sasaran = Rp. 0 | | | | | | | | | | | | |
| 4. IJ.C4 - Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien | | | | | | | | | | | | | |
| | IJ.C4.2 - Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya | 80 % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100 % |
| | Pagu = Rp. 0 | | | | | | | | | | | | |
| | IJ.C4.1 - Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT | 70 % | 34% | 36% | 56% | 60% | 78% | 82% | 100% | 0% | 94% | 51% | 69 % |
| | Pagu = Rp. 26.557.000 | | | | | | | | | | | | |
| | Total Pagu Sasaran = Rp. 26.557.000 | | | | | | | | | | | | |
| | Total Pagu Keseluruhan = Rp. 1.090.601.000 | | | | | | | | | | | | |

Dikelola oleh Kementerian Perindustrian